

Analisis Faktor-Faktor Depresiasi Nilai Tukar Rupiah hingga Menembus Rp18.000 per Dolar AS pada Juni 2026

Mohammad Bagus Nur Rohim^{1*}, Hijrah Khaqo², Dewi Puspaningtyas Faeni³

^{1,2,3}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Dirgantara Suryadarma
251175019@students.unsurya.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 3 September 2026

Page: 1253-1260

Article History:

Received: 18-06-2026

Accepted: 29-09-2026

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS hingga menembus batas psikologis Rp18.000 per Dolar AS pada Juni 2026 serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan respons kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan data sekunder runtut waktu yang mencakup nilai tukar Rupiah, JISDOR, indikator pasar keuangan, kondisi fiskal, kewajiban valuta asing korporasi, harga energi, dan perkembangan risiko eksternal selama semester pertama 2026. Analisis menggunakan perspektif model krisis nilai tukar generasi pertama dan efek neraca korporasi untuk menginterpretasikan keterkaitan antara tekanan fiskal, kebutuhan valuta asing, dan depresiasi nilai tukar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 4 Juni 2026 Rupiah mencapai level terlemah intraday sebesar Rp18.049 per Dolar AS, sedangkan penutupan pasar spot berada pada level Rp18.032 per Dolar AS dan JISDOR Bank Indonesia tercatat sebesar Rp18.039 per Dolar AS. Tekanan nilai tukar berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan utang pemerintah yang jatuh tempo sebesar Rp833,96 triliun, belanja bunga utang sebesar Rp599,44 triliun, kebutuhan valuta asing korporasi, serta peningkatan risiko eksternal dan tekanan harga energi global. Dampak depresiasi tercermin pada tekanan terhadap pasar keuangan dan potensi peningkatan biaya barang serta bahan baku yang bergantung pada impor. Respons kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia diarahkan pada stabilisasi nilai tukar, likuiditas, dan keberlanjutan pembiayaan. Penelitian menyimpulkan bahwa depresiasi Rupiah selama periode pengamatan merupakan fenomena multidimensional yang berkaitan dengan interaksi faktor domestik dan eksternal, sehingga diperlukan penguatan pengelolaan fiskal, diversifikasi pembiayaan, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar secara terukur.

Kata Kunci : Nilai Tukar; Risiko Fiskal; Debt Wall; Kebijakan Moneter; Inflasi Impor

PENDAHULUAN

Stabilitas nilai tukar Rupiah merupakan prasyarat krusial bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka kecil (*small open economy*). Sebagai negara yang menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*) sejak pertengahan tahun 1997, fluktuasi nilai Rupiah terutama dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan di pasar valuta asing, dengan tetap mempertimbangkan pengaruh kebijakan dan intervensi otoritas moneter. Ketika fundamental makroekonomi domestik mengalami guncangan atau terjadi pergeseran persepsi risiko global, nilai tukar dapat mencerminkan persepsi pasar terhadap kondisi fundamental dan kebijakan ekonomi suatu negara (Bank Indonesia, 2026; BIS, 2019).

Pada perdagangan spot Kamis, 4 Juni 2026, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan kuat dan sempat mencapai level Rp18.049 per Dolar AS secara intraday, sehingga menembus batas psikologis Rp18.000 per Dolar AS. Pada akhir perdagangan, Rupiah ditutup pada level Rp18.032 per Dolar AS. Level intraday tersebut menjadi salah satu titik terlemah Rupiah dalam periode pengamatan penelitian ini. Secara tahun kalender berjalan (*year-to-date*), Rupiah telah terdepresiasi sebesar 7,91% dibandingkan posisi awal tahun yang berada pada level Rp16.725 per Dolar AS.

Penurunan tajam nilai tukar ini tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan akumulasi kerentanan fiskal internal dan eskalasi ketidakpastian eksternal. Di satu sisi, Indonesia dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp833,96 triliun. Di sisi lain, eskalasi geopolitik di Timur Tengah akibat serangan militer dan ketidakpastian pasokan energi melalui Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak mentah global yang mempersempit ruang fiskal APBN dan berpotensi meningkatkan kebutuhan valuta asing domestik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan depresiasi Rupiah hingga menembus batas psikologis Rp18.000 per Dolar AS, mengidentifikasi dampaknya terhadap sektor keuangan dan sektor riil, serta mendeskripsikan respons kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah terhadap tekanan nilai tukar tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder runtut waktu (*time series*). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS serta mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan tekanan dan depresiasi Rupiah hingga menembus level Rp18.000 per Dolar AS pada Juni 2026. Interpretasi hasil penelitian menggunakan kerangka model krisis nilai tukar generasi pertama Krugman (1979), teori ekspektasi nilai tukar Obstfeld (1994), *balance-sheet effect* dan *exchange-rate pass-through*.

Data penelitian mencakup perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia selama semester pertama tahun 2026, dengan perhatian khusus pada pergerakan nilai tukar pada 4 Juni 2026. Data yang dianalisis meliputi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, JISDOR, IHSG, LQ45, inflasi, harga emas domestik, indikator fiskal berupa utang pemerintah jatuh tempo dan belanja bunga utang, kebutuhan valuta asing

korporasi, perkembangan harga energi, serta kebijakan moneter dan fiskal yang berkaitan dengan stabilisasi nilai tukar.

Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari sumber resmi dan publikasi lembaga yang relevan. Sumber utama meliputi Bank Indonesia untuk data nilai tukar, JISDOR, kebijakan moneter, dan stabilisasi Rupiah; Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk data APBN, utang pemerintah jatuh tempo, dan belanja bunga utang; Badan Pusat Statistik untuk data inflasi; Bursa Efek Indonesia untuk perkembangan IHSG dan LQ45; serta publikasi IMF, World Bank, Asian Development Bank, BIS, Moody's Ratings, dan S&P Global untuk melengkapi informasi mengenai kondisi ekonomi global, risiko eksternal, dan perkembangan sektor keuangan. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator nilai tukar, fiskal, pasar keuangan, sektor korporasi, energi, dan kondisi eksternal.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi arah dan besaran perubahan setiap indikator serta membandingkannya dengan perkembangan nilai tukar Rupiah selama periode pengamatan. Perubahan nilai tukar dihitung berdasarkan persentase perubahan antara periode berjalan dan periode sebelumnya. Untuk data 4 Juni 2026, analisis membedakan antara kurs pembukaan, level terlemah secara *intraday*, kurs penutupan pasar spot, dan JISDOR untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap posisi nilai tukar. Selanjutnya, perkembangan indikator fiskal, pasar keuangan, kebutuhan valuta asing, harga energi, dan inflasi dianalisis berdasarkan urutan waktu dan keterkaitannya dengan tekanan terhadap Rupiah.

Analisis dampak depresiasi Rupiah dilakukan dengan mengamati transmisi tekanan nilai tukar terhadap pasar keuangan dan sektor riil. Pada sektor keuangan, analisis mencakup perubahan IHSG dan LQ45 serta kondisi pasar obligasi. Pada sektor riil, analisis diarahkan pada potensi peningkatan biaya barang dan bahan baku impor, inflasi, serta beban kewajiban valuta asing korporasi. Sementara itu, dari sisi fiskal, penelitian membedakan antara belanja bunga utang sebagai komponen belanja pemerintah dan SBN yang jatuh tempo sebagai kebutuhan pengelolaan pembiayaan dan *refinancing*. Dengan demikian, nilai utang jatuh tempo tidak diperlakukan sebagai belanja yang secara langsung mengurangi pendapatan negara.

Tahap terakhir adalah analisis terhadap respons kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah terhadap tekanan nilai tukar. Kebijakan dianalisis berdasarkan bentuk intervensi nilai tukar, kebijakan moneter, pengelolaan pembiayaan APBN, dan kebijakan stabilisasi pasar keuangan. Interpretasi hasil dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak melakukan pengujian hubungan kausal melalui regresi atau pengujian ekonometrik, sehingga istilah “menyebabkan” digunakan secara terbatas dan hasil penelitian lebih diarahkan untuk menunjukkan faktor-faktor yang berkaitan dengan tekanan dan depresiasi Rupiah selama periode pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Depresiasi nilai tukar Rupiah hingga menembus batas psikologis Rp 18.000 per Dolar AS pada 4 Juni 2026 merupakan akumulasi dari kerentanan fiskal dalam negeri yang diperparah oleh eskalasi sentimen risiko global. Berdasarkan data perdagangan spot yang digunakan dalam penelitian, Rupiah mengalami tekanan kuat pada 4 Juni

2026 dan mencapai level Rp18.049 per Dolar AS secara intraday. Sementara itu, penutupan pasar spot berada pada level Rp18.032 per Dolar AS. Dengan demikian, level Rp18.049 per Dolar AS dalam penelitian ini merupakan level terlemah secara intraday, bukan harga penutupan. Sebagai pembandingan, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diterbitkan Bank Indonesia tercatat pada level Rp18.039 per Dolar AS.

Tabel 1. Posisi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS pada Kamis, 4 Juni 2026

No.	Indikator	Kurs (Rp/USD)	Keterangan
1	Pembukaan pasar	18.027	Kurs awal perdagangan
2	Level terlemah intraday	18.049	Titik terlemah selama perdagangan
3	Penutupan pasar spot	18.032	Kurs penutupan perdagangan
4	JISDOR	18.039	Kurs referensi Bank Indonesia

Sumber: Data Perdagangan Spot dan Bank Indonesia, 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rupiah pada 4 Juni 2026 telah melewati batas psikologis Rp18.000 per Dolar AS. Perbedaan antara kurs penutupan pasar spot sebesar Rp18.032 dan JISDOR sebesar Rp18.039 perlu dipahami berdasarkan karakteristik masing-masing indikator. Dalam penelitian ini, kurs spot digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai tukar selama perdagangan, sedangkan JISDOR digunakan sebagai kurs referensi Bank Indonesia.

Analisis terhadap data fiskal menunjukkan bahwa tekanan terhadap ruang fiskal menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan dinamika nilai tukar Rupiah. APBN 2026 menghadapi kebutuhan pengelolaan utang jatuh tempo yang mencapai Rp833,96 triliun. Besarnya nilai jatuh tempo tersebut menunjukkan adanya kebutuhan *refinancing* yang signifikan dan menuntut pemerintah menjaga akses pembiayaan serta stabilitas pasar surat utang negara. Di sisi lain, alokasi belanja bunga utang sebesar Rp599,44 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025) merupakan komponen belanja pemerintah pusat yang memberikan tekanan langsung terhadap ruang fiskal.

Kedua komponen tersebut memiliki karakteristik fiskal yang berbeda. Pembayaran bunga utang merupakan belanja pemerintah, sedangkan pembayaran pokok SBN yang jatuh tempo berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan dan *refinancing*. Oleh karena itu, nilai utang pemerintah jatuh tempo tidak tepat diperlakukan sebagai belanja yang secara langsung mengurangi pendapatan negara. Tekanan fiskal lebih tepat dianalisis melalui besarnya beban bunga, kebutuhan *refinancing*, biaya penerbitan kembali utang, serta sensitivitas biaya utang terhadap perubahan suku bunga dan nilai tukar.

Dalam kondisi pasar keuangan yang mengalami tekanan, kebutuhan *refinancing* yang besar dapat meningkatkan sensitivitas pemerintah terhadap perubahan yield SBN. Apabila biaya penerbitan utang baru meningkat, biaya pembiayaan pada periode berikutnya juga berpotensi meningkat. Dengan demikian, besarnya jatuh tempo SBN pada 2026 lebih tepat dipahami sebagai sumber risiko pembiayaan dan *refinancing*, bukan sebagai pengeluaran yang seluruhnya harus dibayar dari pendapatan negara pada tahun berjalan.

Tabel 2. Postur Kewajiban Fiskal dan Keuangan Negara Tahun 2026

No.	Indikator	Nilai	Implikasi Fiskal
1	Utang pemerintah jatuh tempo	Rp833,96 triliun	Meningkatkan kebutuhan <i>refinancing</i> /pengelolaan pembiayaan
2	Belanja bunga utang	Rp599,44 triliun	Menambah beban belanja pemerintah pusat
3	Kewajiban korporasi jatuh tempo	Rp600 triliun	Berpotensi meningkatkan permintaan valuta asing

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), 2026

Dari sisi permintaan valuta asing, tekanan terhadap Rupiah juga dapat berkaitan dengan kebutuhan korporasi untuk memenuhi kewajiban valuta asing, termasuk pembayaran utang luar negeri, kewajiban impor, dan pembayaran kepada investor asing. Besarnya kewajiban valas yang jatuh tempo berpotensi meningkatkan permintaan Dolar AS di pasar domestik, meskipun besarnya kebutuhan tersebut tidak serta-merta sama dengan jumlah utang yang jatuh tempo karena sebagian perusahaan memiliki penerimaan dalam valuta asing, melakukan lindung nilai, atau melakukan *refinancing*.

Perkembangan peringkat kredit *Danantara Investment Management* (DIM) menjadi salah satu indikator yang relevan dalam melihat penilaian lembaga pemeringkat terhadap profil risiko DIM dan keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia. Moody's Ratings memberikan peringkat Baa2 kepada DIM dengan *outlook* negatif. Moody's menilai bahwa terdapat keterkaitan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah Indonesia sebagai pemilik penuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada profil kredit pemerintah Indonesia dapat berimplikasi terhadap profil kredit DIM. Sementara itu, S&P Global Ratings memberikan peringkat BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek kepada DIM dengan *outlook* stabil (Moody's Ratings, 2026; S&P Global Ratings, 2026). Perbedaan *outlook* antara kedua lembaga pemeringkat tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap prospek risiko DIM. Dalam penelitian ini, informasi peringkat kredit tersebut digunakan sebagai indikator profil risiko kredit dan keterkaitan DIM dengan profil risiko pemerintah, bukan sebagai bukti hubungan kausal antara peringkat kredit DIM dan depresiasi Rupiah.

Tabel 3. Peringkat Kredit Danantara Investment Management (DIM), Juni 2026

No	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Kredit	Prospek (<i>Outlook</i>)	Fokus Utama Analisis Kehati-hatian Investor
1	Moody's Ratings	Baa2	Negatif	Keterkaitan erat dengan risiko fiskal kedaulatan negara
2	S&P Global	BBB / A-2	Stabil	Kapasitas pembayaran kewajiban keuangan jangka pendek

Sumber: Moody's Ratings (2026); S&P Global Ratings (2026)

Dampak dari depresiasi Rupiah kemudian berpotensi ditransmisikan ke sektor keuangan dan sektor riil. Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok tajam sebesar 4,11% (turun 254 poin) ke level terendah sepanjang tahun di posisi 5.941 pada sesi perdagangan 3 Juni 2026 (Bursa Efek Indonesia (BEI), 2026).

Penurunan tersebut disertai aksi jual bersih (*net sell*) investor asing yang menunjukkan meningkatnya tekanan jual pada pasar saham. Di sektor riil, depresiasi Rupiah berpotensi meningkatkan tekanan *imported inflation* melalui kenaikan harga barang dan bahan baku yang bergantung pada impor. Inflasi IHK pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08% dan digunakan dalam penelitian sebagai indikator kondisi harga sebelum tekanan nilai tukar pada 4 Juni 2026.

Otoritas moneter dan fiskal merespons tekanan nilai tukar tersebut melalui bauran kebijakan darurat. Pertama, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 8 triliun langsung ke pasar obligasi sekunder sebagai pembeli siaga (*standby buyer*) guna menyerap surat utang SBN yang dilepas investor asing. Langkah ini diikuti oleh tertahannya tekanan pada harga obligasi dan mengalirkan likuiditas kembali ke sistem perbankan, namun dikritik karena berisiko menciptakan distorsi harga semu di pasar. Kedua, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang menurunkan batas (*threshold*) pembelian valuta asing tunai tanpa dokumen pendukung (*underlying transaction*) menjadi sebesar USD 25.000 atau ekuivalennya per bulan untuk setiap pelaku transaksi. Untuk transaksi antara USD 25.000 hingga USD 50.000 selama masa transisi 2 Juni hingga 30 Juni 2026, dokumen pendukung wajib diserahkan paling lambat 31 Juli 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi transaksi valuta asing yang bersifat spekulatif di pasar domestik. Ketiga, Kementerian Keuangan mengimplementasikan prinsip *active liability management* dengan melakukan diversifikasi pembiayaan APBN non-Dolar, seperti penarikan utang domestik berbasis Rupiah sebesar 70-75%, penerbitan Samurai Bond senilai JPY 172 miliar, dan Sukuk Global sebesar USD 2 miliar guna meminimalkan paparan risiko indeks Dolar AS.

Meskipun Rupiah sempat menembus Rp18.049 per Dolar AS, kondisi tersebut perlu dibedakan dari karakteristik krisis keuangan sistemik, analisis komparatif menunjukkan adanya perbedaan mendasar pada profil risiko struktural antara krisis tahun 2026 dan Krisis Keuangan Asia 1997-1998. Perbandingan dengan episode 1997–1998 menunjukkan adanya perbedaan struktur pasar keuangan dan kerangka kebijakan ekonomi. Pada 1997–1998, tekanan nilai tukar berlangsung bersamaan dengan kelemahan sektor perbankan dan tingginya eksposur valuta asing. Pada periode pengamatan 2026, struktur pasar keuangan, kebijakan moneter, dan pengelolaan utang telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, depresiasi Rupiah pada 2026 perlu dianalisis berdasarkan karakteristik fundamental dan struktur keuangan pada periode tersebut, tanpa menyamakannya secara langsung dengan krisis Asia 1997–1998.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Rupiah pada 4 Juni 2026 sempat menembus batas psikologis Rp18.000 per Dolar AS dengan mencapai level terlemah intraday sebesar Rp18.049 per Dolar AS, sementara penutupan pasar spot berada pada level Rp18.032 per Dolar AS. Tekanan terhadap nilai tukar tersebut berkaitan dengan interaksi antara kerentanan fiskal domestik, tingginya kebutuhan valuta asing korporasi, serta peningkatan risiko eksternal dan geopolitik yang berdampak terhadap harga energi impor. Berbagai langkah stabilisasi yang ditempuh oleh otoritas diarahkan untuk meredam volatilitas nilai tukar jangka pendek, meskipun efektivitas

masing-masing kebijakan masih memerlukan evaluasi menggunakan analisis sebelum dan sesudah kebijakan.

Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan risiko fiskal, diversifikasi sumber pembiayaan, pengelolaan kewajiban valuta asing korporasi, serta peningkatan transparansi komunikasi kebijakan ekonomi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar juga perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan indikator pasar valuta asing, pasar obligasi, pasar saham, dan inflasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta Departemen Komunikasi Bank Indonesia atas transparansi penyediaan data publikasi statistik ekonomi, laporan lelang SBN, serta rilis kebijakan moneter berkala yang menjadi basis data utama dalam penyusunan analisis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asian Development Bank. (2026, September). *Asian development outlook September 2026: Navigating prolonged energy shocks and El Niño*. Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/FLS260387-3>
- [2] Badan Pusat Statistik. (2026, June 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen*. Badan Pusat Statistik. BPS – Inflasi Mei 2026
- [3] Bank for International Settlements. (2008). *Exchange rate pass-through in emerging market economies: What has changed and why?* (BIS Papers No. 35). Bank for International Settlements.
- [4] Bank for International Settlements. (2018). *Foreign currency borrowing, balance sheet shocks and real outcomes* (BIS Working Papers No. 758). Bank for International Settlements.
- [5] Bank for International Settlements. (2019). *Exchange rates and monetary policy frameworks in emerging market economies*. Bank for International Settlements.
- [6] Bank for International Settlements. (2020). *Corporate dollar debt and depreciations: All's well that ends well?* (BIS Working Papers No. 879). Bank for International Settlements.
- [7] Bank Indonesia. (2026). *Laporan kebijakan moneter triwulan II 2026*. Bank Indonesia.
- [8] Bank Indonesia. (2026). *Laporan perekonomian Indonesia 2025*. Bank Indonesia.
- [9] Bank Indonesia. (2026). *Tinjauan kebijakan moneter Juni 2026*. Bank Indonesia.
- [10] Indonesia Strategic and Economic Action Institution. (2026). *Laporan analisis kritis keberlanjutan utang Indonesia 2026*
- [11] International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director* (IMF Staff Country Report No. 2026/010). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798229035576.002>
- [12] Isard, P. (2006). Uncovered interest parity. *IMF Working Papers, 2006*(096). International Monetary Fund.

-
- [13] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026: Buku II*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [14] Krugman, P. (1979). A model of balance-of-payments crises. *Journal of Money, Credit and Banking*, 11(3), 311–325.
- [15] Mehl, A. (2009). Uncovered interest parity at long horizons: Evidence on emerging economies. *Review of International Economics*, 17(5), 1019–1037. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.2008.00793.x>
- [16] Moody's Ratings. (2026, June 3). *Moody's Ratings assigns first-time Baa2 issuer rating to Danantara Investment Management (P.T.); outlook negative*.
- [17] Obstfeld, M. (1994). The logic of currency crises (NBER Working Paper No. 4640). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w4640>
- [18] S&P Global Ratings. (2026, June 3). *Research update: Danantara Investment Management assigned 'BBB/A-2' ratings; outlook stable*.
- [19] Tarmidi, L. T. (2003). Krisis moneter Asia: Sebab, dampak, dan peran IMF. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 112–125.
- [20] World Bank. (2026, June). *Indonesia economic prospects: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.